

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

Yohanes Niko¹, Dr. Dedi Kusnadi, M.Si², Dr. H. Agus Sikwan, M.Hum²
Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam menganalisis masalah penelitian ini menggunakan teori Charles O Jones tentang proses implementasi kebijakan yang meliputi 3 (tiga) proses yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa proses implementasi program KIP di sekolah dasar Kecamatan Putussibau Utara masih ditemukan kendala-kendala yang menyebabkan tujuan program belum sepenuhnya terwujud. Proses implementasi tersebut, tercermin dari tahapan-tahapan sebagai berikut : 1) pada proses organisasi; masih ditemukan permasalahan yaitu koordinasi yang belum optimal, sehingga terdapat perbedaan data penerima KIP sekolah dengan data dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan up date data sekolah (dapodik) kurang maksimal dilaksanakan oleh sekolah apabila terjadi perubahan data siswa; 2) Pada proses interpretasi; juknis KIP kurang disosialisasikan dengan baik kepada orang tua murid penerima KIP, sementara pemanfaatan KIP sangat tergantung dari pemahaman orang tua terhadap manfaat KIP bagi para murid. Kondisi ini mengakibatkan beberapa orang tua murid memanfaatkan dana KIP di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam juknis program KIP; 3) Pada proses aplikasi; tidak semua SD di Kecamatan Putussibau Utara dapat menerima KIP tepat waktu, karena beberapa sekolah yang berada di desa pedalaman tidak memiliki ATM/Bank untuk melakukan pencairan. Di samping itu, juknis PIP yang dibuat oleh pemerintah pusat sangat kaku dan mengikat, tidak memperhatikan kondisi wilayah secara geografis dan demografis.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program KIP, Sekolah Dasar.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang dapat mempercepat tujuan pendidikan nasional.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah perlunya perluasan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Indikator masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dapat dilihat dari angka putus sekolah yang masih tinggi. Fakta tersebut, menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin masyarakat akan semakin sulit mengakses pendidikan. Fenomena tersebut diperkuat dengan fakta bahwa disparitas angka partisipasi pendidikan antar daerah masih cukup tinggi. Salah satu alasan rendahnya

partisipasi pendidikan khususnya kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

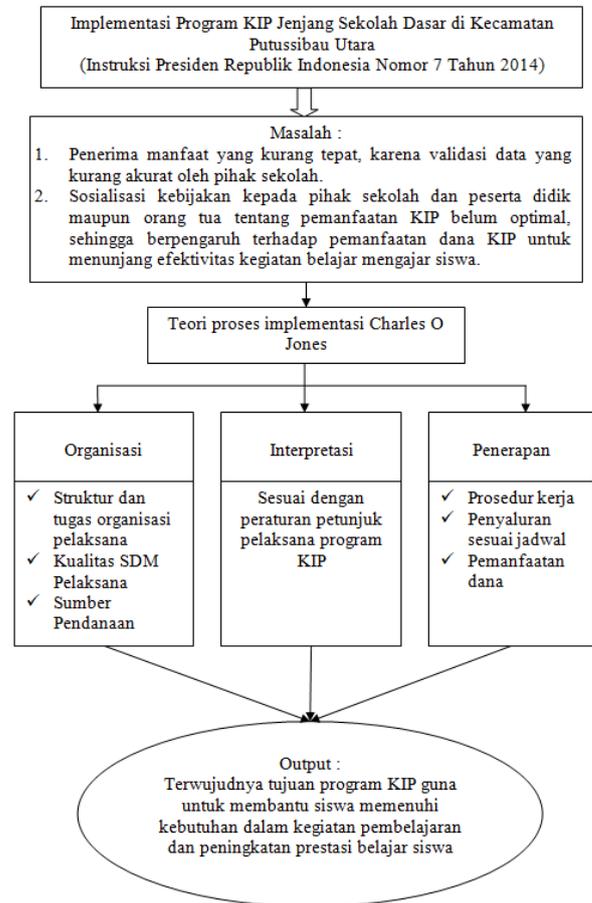
Program Indonesia Pintar (PIP) melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait dengan proses pencairan dana yang tidak merata, dalam arti terdapat siswa yang sudah menerima namun ada pula yang belum menerima. Aspek penting dalam program ini selain terlaksananya program sesuai dengan standar operasional prosedur adalah pemanfaatan dana sesuai dengan kebutuhan siswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kendati memiliki dasar hukum, petunjuk teknis dan pelaksana, implementasi program KIP di Kabupaten Kapuas Hulu masih mengalami beberapa permasalahan. Fenomena yang terjadi salah satunya

adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP. Kondisi ini terjadi karena validasi data yang kurang akurat oleh pihak sekolah.

Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. KIP akan bermanfaat bagi siswa apabila dalam implementasinya dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target group yang akan menerima KIP merupakan siswa yang betul-betul layak diberikan bantuan karena tidak mampu membiayai uang sekolah. Lebih jauh permasalahan dalam implementasi KIP adalah berkaitan dengan pemanfaatan dana KIP oleh siswa penerima. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa dana KIP yang disalurkan langsung oleh pihak sekolah kepada para siswa penerima tidak sepenuhnya dipergunakan untuk menunjang kegiatan belajar siswa seperti untuk membiayai uang sekolah dan pembelian alat tulis serta buku-buku

pelajaran. Bahkan siswa penerima KIP tidak menunjukkan grafik peningkatan belajar seperti hasil ulangan harian dan pelaksanaan tugas-tugas sekolah.



Gambar 1.1 Alur Pemikiran

B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai proses implementasi program KIP pada jenjang SD di Kabupaten Kapuas Hulu akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Nazir (1998:72) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian berlangsung, sekaligus sebagai tempat peneliti memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih adalah di SDN 13 Tanjung Lasa dan SDN 04 Putussibau di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari :

1. Teknik wawancara
2. Teknik Observasi
3. Teknik dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya setelah data terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan-ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini mengacu pada pandangan Miles dan Huberman (1992: 15-20) dengan prosedur : reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terhadap proses implementasi program KIP di Sekolah Dasar Kecamatan Putussibau Utara. Sesuai dengan teori yang digunakan pembahasan pada bab V ini menyangkut 3 (tiga) aspek yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi.

1. Organisasi

Dalam implementasi program KIP di SDN 04 Putussibau dan SDN 13 Tanjung Lasa, diperlukan sebuah pengorganisasian berupa struktur dan tugas organisasi yang jelas, kualitas sumber daya organisasi dan tersedianya sumber daya organisasi berupa sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan program tersebut. Fungsi yang diemban dalam struktur organisasi dan mekanisme kerjanya akan berperan dalam kualitas pelaksanaan kebijakan oleh organisasi.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di lapangan baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator Pendidikan dan pihak Sekolah, menunjukkan bahwa permasalahan yang krusial dalam program KIP adalah mendapatkan data yang valid dan akurat sebagaimana kriteria penerima KIP. Pasalnya dalam hal ini sering terjadi

perbedaan data siswa penerima KIP yang dirilis oleh Pusat yaitu Direktur Jenderal Teknis Pengelola KIP di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta dengan data yang diusulkan oleh sekolah hasil dari input di dapodik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan organisasi dalam program KIP di Kecamatan Putussibau Utara adalah koordinasi yang belum berjalan baik antara pihak sekolah di tingkat paling bawah dengan lembaga pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Seringkali data yang terbaru kurang di up date oleh sekolah maupun Dirjen, sehingga sering terjadi perbedaan data penerima. Permasalahan ini bukan hanya dalam lingkup program KIP, tetapi dalam program-program lain seperti BOS.

Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Keberadaan Sumber Daya

Manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting. SDM merupakan faktor aktif yang bertugas mengelola dan memberdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan sarana yang lengkap tidak akan membuat implementasi kebijakan berhasil jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang profesional.

Berangkat dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa petugas yang menangani program KIP mengalami kesulitan karena apa yang mereka laksanakan memerlukan keahlian tertentu yang selama ini tidak mereka miliki.

Dan memang harus diakui bahwa dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan diperlukan keahlian khusus yang tidak saja hanya terpaku kepada angka-angka tetapi ada rasa sensitivitas dengan melihat kondisi riil dilapangan.

Hasil wawancara selanjutnya yang penulis lakukan dengan Koordinator Pendidikan Kecamatan Putussibau Utara mengenai keahlian/kemampuan pihak sekolah dalam melaksanakan program KIP memberikan keterangan sebagai berikut :

”di tingkat SD yang menangani program KIP adalah Kepala Sekolah, guru dan komite sekolah, selama ini yang dirasakan agak sulit oleh pihak sekolah adalah mengenai penyeleksian siswa calon penerima KIP, karena di beberapa sekolah

terdapat jumlah siswa yang orang tuanya terkategori tidak mampu sementara kuota KIP di sekolah tersebut sangat terbatas'. (wawancara, 8 Januari 2020)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan bukan hanya pada SDM, tetapi ada kendala di lapangan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam juknis.

Dalam implementasi kebijakan, selain dibutuhkan organisasi pelaksana dan kualitas sumber daya pelaksana, yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut aspek pendanaan program. Program KIP merupakan kebijakan dalam bentuk pemberian uang secara langsung kepada siswa penerima yang telah diseleksi melalui transfer ke rekening siswa.

Adapun sumber pendanaan dalam program KIP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, menunjukkan bahwa dari aspek pendanaan program KIP yang seluruh sumber dananya berasal dari pemerintah pusat

melalui APBN tidak menjadi kendala, karena seluruh dana yang disalurkan sudah sesuai dengan data dan juknis program KIP. Kendatipun demikian untuk di beberapa SD, seperti di SDN 13 Tanjung Lasa, alokasi dana KIP belum sesuai apabila dibandingkan dengan kondisi siswa yang seharusnya lebih banyak yang menerima. Artinya bahwa sumber pendanaan KIP belum sesuai dengan jumlah siswa yang seharusnya layak memperoleh bantuan. Artinya bahwa dana yang dianggarkan meskipun sudah sesuai dengan kuota tetapi belum sejalan dengan tujuan program untuk membantu siswa miskin dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Belum sesuainya jumlah kuota yang dianggarkan dengan jumlah siswa miskin yang seharusnya menerima KIP turut mempengaruhi keberhasilan implementasi program, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan adalah tersediannya sumber (resources) yang merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan, betapapun telah dirumuskan secara baik, didukung oleh perangkat hukum atau peraturan yang kuat, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan

sumber daya yang memadai, baik berupa dana, peralatan, teknologi dan sarana serta prasarana lainnya akan sulit untuk dilaksanakan.

2. Interpretasi

Interpretasi menurut Jones adalah The translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives. (menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan). Jones mengemukakan alasan pentingnya untuk mengungkapkan apa, bagaimana dan siapa dalam penafsiran adalah bahwa studi semacam ini lebih memfokuskan perhatian pada pengharapan para pelaksana serta yang lainnya terhadap terhadap suatu kebijakan. Interpretasi dalam penelitian ini adalah berupaya untuk melihat sejauhmana aktor yang terlibat (implementor kebijakan) menafsirkan implementasi program KIP terlaksana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Adapun acuan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi program KIP adalah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah. Petunjuk pelaksana KIP selalu berubah setiap tahun, tentu saja menyesuaikan dengan perubahan dan adanya perbaikan dalam juklak yang dievaluasi berdasarkan masukan dari stakeholder.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, menunjukkan bahwa pihak sekolah selaku pelaksana dan penanggungjawab program KIP di tingkat sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menyeleksi siswa penerima KIP. Akan tetapi proses penyeleksian program KIP tersebut tidak lepas dari kendala-kendala teknis, seperti minimnya kuota dengan calon siswa penerima KIP. Kondisi ini seperti diungkapkan oleh Kepala SDN 13 Tanjung Lasa bahwa : “program KIP khususnya pada tahap penyeleksian kami mengalami sedikit kendala antara lain masih banyak murid yang harus menerima tetapi kuotanya terbatas, indeks kemiskinan masih sulit diukur dan ketidakpastian berapa banyak keperluan siswa yang masih harus dipenuhi”.

Berangkat dari keterangan yang dikemukakan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan penyeleksian siswa penerima KIP, paling tidak terdapat 3 masalah besar yang dihadapi pihak sekolah, seperti kuota terbatas, indeks kemiskinan dan keperluan siswa. Kuota terbatas, semakin menuntut

pihak sekolah agar melakukan penyeleksian secara baik, meskipun kuota yang diberikan untuk siswa miskin di Kecamatan Putussibau Utara terbatas. Minimnya kuota yang diberikan kepada tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana proses penentuan kuota KIP untuk sebuah sekolah.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu memberi keterangan bahwa : “penentuan kuota KIP kepada sekolah adalah berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam juklak, yaitu : “penentuan jumlah kuota penerima KIP dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam implementasi program KIP, masalah kriteria kemiskinan masih menjadi kendala, dimana pihak sekolah dalam menentukan siswa miskin terkadang menentukan keluarga miskin dengan pertimbangan lain, seperti jumlah keluarga, dan jumlah tanggungan, serta faktor lainnya. Selain itu kemiskinan sifatnya adalah relatif dimana letak wilayah juga berpengaruh terhadap penerapan kriteria kemiskinan, karena miskin disatu wilayah belum tentu miskin diwilayah lain, contohnya apabila terdapat rumah tangga miskin yang berada komplek yang mewah, seringkali terindikasi tidak

masuk dalam kategori rumah tangga miskin, selain itu apabila sebuah keluarga miskin tetapi merupakan keturunan orang kaya, atau memiliki kerabat yang mampu sering diindikasikan sebagai orang mampu juga. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah bahwa kriteria yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sering tidak tepat digunakan pada daerah-daerah tertentu, sehingga pihak sekolah dalam menentukan apakah seseorang miskin atau tidak berdasarkan temuan dilapangan. Dan sebagai akibatnya adalah pendataan menjadi kurang efektif karena siswa yang ditetapkan sebagai sasaran penerima KIP, terkadang bertentangan dengan pendapat dari masyarakat.

Tahap selanjutnya dalam implementasi program KIP setelah pelaksanaan seleksi adalah penetapan siswa penerima KIP. Proses penetapan siswa penerima KIP merupakan rangkaian dalam proses kebijakan yang merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Oleh karena itu, proses penetapan sangat bergantung dari keberhasilan dalam tahap penyeleksian siswa penerima KIP.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, berkaitan dengan prosedur penetapan siswa penerima KIP,

diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“Adapun prosedur pelaksanaan KIP berdasarkan juknis yaitu sekolah mengirimkan data siswa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta. Pada proses selanjutnya, pihak sekolah mengundang siswa dan orang tua murid penerima KIP untuk diberikan informasi mengenai hal terkait. Dalam hal ini pihak sekolah juga dapat mengusulkan nama siswa lain yang di luar kepemilikan KIP untuk turut serta diusulkan sebagai calon penerima KIP sesuai dengan juknis”.(wawancara, 7 Januari 2020)

Berdasarkan tahapan penetapan siswa penerima KIP, menunjukkan bahwa proses penetapan siswa penerima KIP tidak serumit dan sesulit dengan proses penyeleksian. Dalam hal ini, pihak sekolah tidak lagi melakukan verifikasi data, tetapi hanya melengkapi identitas siswa penerima KIP dan berbagai persyaratan lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peran penting dalam tahap penetapan siswa penerima KIP. Pada tahap inilah Dinas melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan data yang dikirimkan pihak sekolah, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan data

siswa, atau bahkan Dinas Pendidikan dapat mengganti siswa yang diusulkan oleh pihak sekolah manakala mereka mendapati data yang kurang akurat atau terdapat siswa yang kurang layak menerima KIP.

Sebelum kebijakan di implementasikan hendaknya kebijakan tersebut di komunikasikan kepada kelompok pelaksana dan kelompok sasaran atau kelompok yang terlibat secara tidak langsung. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam mengkomunikasikan kebijakan harus ada kejelasan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.

Berdasarkan petunjuk pelaksana, disebutkan bahwa program KIP harus disosialisasikan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sampai pada sekolah. Sosialisasi yang dimaksud adalah mengenai proses pelaksanaan program KIP mulai dari pendataan, pencairan hingga pemanfaatan dana KIP.

Pernyataan yang disampaikan oleh Komite Sekolah tersebut, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sosialisasi mereka gencar untuk meminta pihak sekolah agar membenahi permasalahan validasi data siswa penerima KIP. Di

samping itu, juga menekankan agar pihak sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua murid penerima KIP.

Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas sosialisasi KIP kepada orang tua perihal pemanfaatan dana KIP. Dari hasil wawancara dengan Kepala SDN 13 Tanjung Lasa, memberikan keterangan bahwa : “kami mengundang orang tua atau wali murid yang menerima KIP untuk menjelaskan program KIP, dan ketentuan pemanfaatan dana KIP kepada siswa, sejauh ini KIP sudah dibelanjakan oleh orang tua untuk kebutuhan sekolah, tetapi masih ada pula yang memanfaatkan untuk keperluan lainnya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa pemanfaatan KIP oleh siswa sudah sesuai dengan juklak, meskipun masih ada yang memanfaatkannya tidak untuk menunjang kegiatan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi program KIP perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan agar pemanfaatan KIP tepat sasaran dan tepat guna.

Kesulitan dalam kegiatan penyeleksian siswa penerima KIP dikarenakan kurangnya komunikasi yang terjadi dalam implementasi program tersebut karena masalah geografis. Akibat kurangnya komunikasi maka implementor di tingkat/level bawah tidak bisa berbuat

banyak untuk melaksanakan program dan juga target kebijakan yang tidak mendapatkan penjelasan secara maksimal. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam organisasi untuk memberikan kejelasan tentang tujuan yang diinginkan. Ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsisten dari ukuran dasar tentang tujuan yang dikomunikasikan memberikan gambaran yang jelas sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari tujuan itu.

3. Aplikasi

Aplikasi menurut Jones adalah the routine provision of services, payment or other agreed upon program objectives or instruments. (ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau peralatan). Sehubungan dengan penelitian ini, akan dielaborasi lebih jauh sejauhmana prosedur kerja dalam implementasi program KIP sudah terlaksana, penyaluran dana KIP secara langsung kepada siswa sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dana KIP yang diterima oleh siswa sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Kurang sebandingnya kuota dengan jumlah siswa miskin di Kecamatan Putussibau Utara, khususnya di SDN 13 Tanjung Lasa dikhawatirkan akan

menimbulkan permasalahan baru yaitu terjadinya diskriminasi di kalangan siswa miskin, karena memberikan bantuan berupa program KIP kepada sebagian siswa yang membutuhkan tetapi siswa lain yang juga membutuhkan tidak mendapatkan bagian justru akan menimbulkan kesedihan bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan.

Pihak sekolah tentu tidak bisa berbuat banyak dengan kuota yang diberikan dan tentunya pihak sekolah harus bekerja keras agar keterbatasan kuota tersebut benar-benar dirasakan oleh para siswa yang membutuhkan. Terkait dengan kurang sesuainya kuota yang diberikan kepada siswa miskin penerima KIP, merupakan salah satu permasalahan yang terjadi dalam implementasi program KIP, hal ini dikarenakan penentuan kuota penerima KIP oleh pemerintah pusat dan provinsi didasarkan atas data jumlah siswa miskin yang terdapat di satu sekolah atau secara keseluruhan di kabupaten yang dalam hal ini adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Artinya kuota yang diberikan merupakan hasil verifikasi atau data siswa miskin yang diberikan oleh sekolah.

Berangkat dari hasil penelitian tersebut, diperoleh keterangan bahwa proses penyeleksian yang dilakukan dalam program KIP, terdapat

permasalahan menyangkut keakuratan data atau informasi yang dijadikan sebagai sumber dalam menentukan seseorang, hal ini terlihat dari terdapatnya perbedaan data yang dimiliki pihak sekolah dengan dinas pendidikan. Dalam lingkup kabupaten saja data siswa miskin berbeda antara dinas pendidikan dengan sekolah. Apalagi dikaitkan dengan data yang terdapat di dinas pendidikan provinsi maupun di kementerian pendidikan. Data yang kurang akurat menjadi sebuah hal yang riskan dalam pengambilan sebuah kebijakan, apalagi jika kebijakan yang akan diambil menyangkut permasalahan urgen di masyarakat seperti masalah kemiskinan. Gambaran mengenai kurang akuratnya data dalam penentuan kuota penerima di SDN 13 Tanjung Lasa merupakan salah satu permasalahan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III mengenai faktor sumber daya kebijakan, dimana dalam mengimplementasikan kebijakan harus memiliki sumber-sumber yang lengkap salah satunya adalah adanya sumber informasi yang akurat, yaitu menyangkut informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi.

Melihat kondisi di lapangan dalam proses penyeleksian siswa penerima KIP

di SDN 04 Putussibau dan SDN 13 Tanjung Lasa, dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi sejalan dengan pernyataan Dunn (2000:171) bahwa masalah yang paling penting dalam implementasi adalah memindahkan keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Artinya bahwa kebijakan kurikulum yang sudah jelas konsep, tujuan dan didukung dengan petunjuk teknis pelaksanaan, tidak selamanya akan terlaksana dalam proses penentuan siswa miskin penerima KIP seperti apa yang tertuang dalam kebijakan.

Untuk mengetahui kondisi objektif terkait besaran penyaluran dana KIP kepada siswa penerima, maka diperlukan keterangan dari berbagai pihak baik dari pihak sekolah maupun siswa penerima KIP. Berdasarkan wawancara dengan Kepala SDN 04 Putussibau mengatakan bahwa :

“dalam penyaluran dana KIP kepada siswa penerima kami bisa langsung mendatangi BRI yang terdapat di Kecamatan Putussibau Utara, untuk SDN 04 Putussibau Utara tidak ada masalah, pada saat dilakukan pengumuman pencairan orang tua dapat langsung ke bank untuk melakukan pencairan, dan sebagaimana info dari orang tua pihak bank tidak melakukan penarikan seperti biaya administrasi untuk penarikan KIP tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara

tersebut, menunjukkan bahwa SDN 04 Putussibau telah dilaksanakan pencairan dana KIP kepada siswa penerima KIP melalui transfer langsung kepada rekening siswa penerima KIP. Hal yang sama juga terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Kepala SDN 13 Tanjung Lasa terkait pencairan dana KIP sebagai berikut :

“penerima KIP di SDN Tanjung Lasa sudah dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, dalam hal ini sebagian besar pencairan atau penarikan dana oleh orang tua tidak berjalan secara serentak, karena di Tanjung Lasa tidak terdapat Bank atau ATM untuk melakukan pencairan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa dalam proses pencairan dana KIP belum berjalan dengan baik, karena belum semua siswa melakukan pencairan, dengan alasan akses yang jauh dari tempat pencairan yaitu lokasi Bank. Terkait dengan proses pencairan, terdapat perbedaan waktu karena bukan dicairkan oleh sekolah, tetapi ditarik langsung oleh orang tua. Permasalahan geografis wilayah di Kecamatan Putussibau Utara menjadi kendala dalam pelaksanaan KIP, khususnya pada tahap pencairan. Jarak tempuh yang tempat tinggal siswa dengan Bank cukup jauh, sementara itu di sekitar sekolah tidak terdapat Bank.

Berdasarkan data yang diperoleh,

menunjukkan bahwa pencairan dana KIP SDN 04 Putussibau juga belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masih cukup banyak siswa yang belum melakukan aktivasi pencairan, meskipun lokasi SDN 04 Putussibau berada di perkotaan yang akses Bank cukup mudah. Sebagaimana telah disinggung pada penjelasan terdahulu bahwa program KIP dalam bentuk pencairan dana langsung kepada penerima melalui Bank, kurang memperhatikan aspek geografis dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata disetiap daerah di pedesaan, sehingga menjadi penghalang dalam proses pencairan.

Guna mengetahui lebih objektif pemanfaatan dana KIP oleh para siswa penerima, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang tua siswa yang mendapatkan program KIP. Dalam wawancara ketika penulis menanyakan manfaat yang diperoleh dari dana KIP, salah seorang siswa mengatakan bahwa : “saya sangat senang anak mendapat bantuan tersebut. Dan sangat membantu sekali untuk meringankan beban biaya yang harus saya keluarkan untuk keperluan sekolah”.

Selanjutnya ketika penulis mewawancarai orang tua siswa tersebut untuk mengetahui bagaimanakah pemanfaatan dana KIP, apakah sudah

digunakan untuk mendukung kegiatan belajar. Orang tua siswa bersangkutan merespon dengan memberikan jawaban bahwa : “dana tersebut digunakan untuk membeli buku-buku pelajaran dan alat tulis”. Mengenai pemanfaatan dana KIP untuk keperluan diluar kegiatan yang mendukung kegiatan belajar, orang tuas siswa tersebut lebih jauh mengatakan bahwa : “dana KIP dipakai juga untuk keperluan saya sehari-hari seperti untuk membiayai kebutuhan makan dan minum serta untuk uang jajan di sekolah”.

Sementara terkait dengan pemanfaatan dana oleh siswa, pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak hanya sekedar mengarahkan siswa agar menggunakan dana KIP tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala SDN 04 Putussibau bahwa : ”kami pihak sekolah sifatnya hanya mengarahkan saja supaya uang tersebut digunakan dengan baik, terutama untuk keperluan sekolah siswa yang bersangkutan”.

Pengimplementasian program yang dijalankan, aspek yang tidak bisa dilepaskan adalah target group (Arifin, 2020, Hal. 200-201). Orang tua murid sebagai kelompok sasaran sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi program.

Sewaktu penulis melakukan

wawancara dengan beberapa orang tua murid penerima KIP, dalam wawancara terhadap pengetahuan orang tua murid mengenai pemanfaatan dana KIP dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan menggunakan dana KIP, salah seorang orang tua murid memberikan jawaban bahwa : “saya mengetahui pemanfaatan dana KIP tersebut, karena kami dibagikan pedoman pelaksanaan program tersebut, dan saya sudah membacanya”.

Pemanfaatan dana KIP oleh siswa penerima, akan dapat terkontrol sesuai dengan peruntukannya, apabila orang tua juga ikut campur tangan dalam pemanfaatan dana tersebut. Orang tua dapat melihat bagaimana perilaku anaknya dalam menggunakan dana tersebut untuk keperluan sekolah. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang orang tua murid memberikan penjelasan bahwa : “kami turut ikut campur dalam mengawasi penggunaan dana KIP oleh anak, saya beritahukan kepada anak saya supaya uang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, sebagai orang tua sebagai orang tua berkewajiban mengarahkannya, takut uang tersebut tidak digunakan dengan baik, saya beritahu dia gunakan saja untuk keperluan sekolah”.

Dalam penggunaan dana tersebut,

orang tua tersebut memberikan penjelasan bahwa dana KIP tersebut sudah digunakan dengan baik-baiknya, karena memang saya awasi, segala keperluan sekolahnya pun sudah bisa teratasi. Dia pun tidak ada meminta sama saya lagi untuk membeli segala macam keperluan sekolah”.

Bagi orang tua murid yang aktif dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan dana KIP oleh anaknya akan membantu siswa agar dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi permasalahan yang masih timbul adalah tidak semua orang tua mau terlibat aktif untuk mengontrol penggunaan dana oleh anaknya, bagi orang tua yang sibuk dengan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka interaksi dan pengawasan terhadap anak menjadi kurang. Terlebih bagi mereka yang tidak tinggal bersama orang tua, maka penggunaan dana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada anak.

Minimnya keterlibatan orang tua dalam mengontrol anaknya dalam menggunakan dana KIP tentu akan berdampak terhadap efektivitas pemanfaatan dana KIP. Dalam implementasi kebijakan keterlibatan orang tua dapat dikategorikan sebagai dukungan dari lingkungan kebijakan, yang menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:94) variabel lingkungan kebijakan mencakup:

(1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Mekanisme pemberian secara langsung dana KIP, disatu sisi memberikan manfaat yang positif dalam implementasi program bantuan bagi siswa miskin, hal ini dikarenakan bantuan tersebut akan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan dengan leluasa oleh para siswa, serta menghindari terjadinya penyelewengan dana KIP oleh pihak sekolah. Akan tetapi disisi lain, pemberian langsung dana KIP kepada siswa dikhawatirkan justru akan menyebabkan tidak efektifnya penggunaan dana tersebut, hal ini dikarenakan tidak ada pengawasan yang intensif kepada siswa dalam pemanfaatan dana KIP, tidak ada kewajiban siswa di dalam juklak untuk menulis rincian penggunaan dana KIP tersebut kepada pihak sekolah, meskipun selama ini dari hasil pengamatan dan dokumentasi pihak sekolah menunjukkan bahwa siswa penerima KIP sudah memenuhi kewajibannya untuk membiayai uang sekolah, diluar biaya untuk membayar uang sekolah sulit bagi pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan untuk

mengontrol penggunaan dana KIP oleh para siswa.

Kondisi di atas merupakan kelemahan dari program KIP, pemberian kepercayaan kepada siswa untuk memanfaatkan dana tersebut tentu akan menimbulkan penyalagunaan atau inefisiensi, karena tidak ada pihak yang ikut campur atau mengontrol penggunaan dana. Meskipun pihak sekolah telah memberikan arahan kepada siswa penerima agar memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka membiayai pendidikan, tetapi tidak ada yang mengontrol secara langsung penggunaan dana oleh siswa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah proses implementasi program KIP di sekolah dasar Kecamatan Putussibau Utara masih ditemukan kendala-kendala yang menyebabkan tujuan program belum sepenuhnya terwujud. Proses implementasi tersebut, tercermin dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pada proses organisasi; ditinjau dari struktur organisasi dan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi), koordinasi, dan sumber daya organisasi sebagai penggerak bagi

- bekerjanya implementor program KIP sudah cukup memadai. Hanya saja permasalahan dalam pengorganisasian adalah koordinasi yang belum optimal, sehingga terdapat perbedaan data penerima KIP sekolah dengan data dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan up date data pokok sekolah (dapodik) kurang maksimal dilaksanakan oleh sekolah apabila terjadi perubahan data siswa.
2. Pada proses interpretasi; KIP yang merupakan program pemerintah pusat dan bersifat sentralistik sudah didukung dengan petunjuk teknis sebagai panduan bagi para implementor baik ditingkat pusat maupun di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam juknis. Kendati demikian, juknis kurang disosialisasikan dengan baik kepada orang tua murid penerima KIP, sementara pemanfaatan KIP sangat tergantung dari pemahaman orang tua terhadap manfaat KIP bagi para murid. Kondisi ini mengakibatkan beberapa orang tua murid memanfaatkan dana KIP di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam juknis program KIP.
 3. Pada proses aplikasi; program KIP dalam bentuk pemberian dana kepada peserta didik untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau mekanisme penyaluran KIP kepada penerima manfaat yaitu langsung di transfer ke rekening siswa. Siswa penerima sangat merasakan manfaat dana KIP, karena meringankan biaya untuk keperluan sekolah. Namun demikian, tidak semua SD di Kecamatan Putussibau Utara dapat menerima KIP tepat waktu, karena beberapa sekolah yang berada di daerah pedalaman tidak memiliki ATM/Bank untuk melakukan pencairan. Di samping itu, juknis PIP yang dibuat oleh pemerintah pusat sangat kaku dan mengikat, tidak memperhatikan kondisi wilayah secara geografis dan demografis.

2. Saran

Berangkat dari kesimpulan hasil penelitian, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pembenahan organisasi dalam implementasi program KIP, terutama menyangkut

- penyediaan sumber daya manusia dalam melakukan penyeleksian siswa penerima KIP, pihak sekolah diharapkan dapat melakukan penyeleksian lebih ketat untuk menjaring siswa yang betul-betul layak menerima KIP, dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan langsung ke rumah-rumah calon siswa penerima KIP dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan melakukan wawancara langsung dengan orang tua murid. Dalam penyeleksian tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan komite sekolah, pemerintah desa, termasuk dengan melakukan cross cek data penduduk yang merupakan orang tua murid pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH) serta dengan pihak lain yang mengerti dengan masalah kemiskinan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu bersama Koordinator Pendidikan Kecamatan Putusibau Utara diharapkan dapat memberikan penjelasan berupa sosialisasi secara rutin kepada pihak sekolah selaku pengelola program KIP di tingkat sekolah dasar di Kecamatan Putussibau Utara, agar tidak terjadi kebingungan dalam melakukan penyeleksian siswa penerima KIP, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap penerima KIP, karena adanya perbedaan dalam menentukan kelayakan siswa penerima KIP.
 3. Agar siswa penerima KIP benar-benar mencerminkan siswa miskin yang layak menerima manfaat KIP, diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, tidak hanya sekedar melakukan verifikasi data dari pihak sekolah tetapi verifikasi juga diharapkan dapat dilakukan dengan meneliti kembali data siswa yang diajukan oleh sekolah dengan kondisi kehidupan siswa, sehingga penetapan siswa penerima KIP tersebut benar-benar akurat.
 4. Agar pemanfaatan dana KIP dapat digunakan oleh siswa dalam rangka menunjang prestasi belajar maka monitoring dan pengawasan perlu dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan oleh pihak sekolah dengan meminta laporan penggunaan dari orang tua siswa penerima, selain itu keterlibatan komite sekolah sangat diperlukan agar pemanfaatan dana KIP oleh siswa sesuai dengan petunjuk teknis.

5. Monitoring perlu dilakukan oleh pihak sekolah, dengan memantau perkembangan prestasi siswa penerima KIP, dengan tujuan agar penerima KIP tidak hanya menerima manfaat tetapi juga dapat menunjang peningkatan prestasi belajar.
6. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat juklak yang menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi dan infrastruktur daerah untuk mengatasi permasalahan implementasi program KIP, seperti dalam masalah pendistribusian dana kepada siswa penerima.
7. Perlu adanya hubungan yang intensif antara pihak penyalur (BRI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud kab/kota) dalam proses percepatan penyaluran dana ke siswa penerima.

E. REFERENSI

- Anderson, James E. 1997. *Public Policy-Making*. Third Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Amirin. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Arifin, A. 2020. “Efektivitas Implementasi Penanggulangan Bencana Kabuat Asap di Kota Pontianak.” *JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development* 1, N0.2 (2020) : 200-2001. doi.:

<http://dx.doi.org/10.2648/jpasdev.v1i2.43654>

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gaffar, Affan. 1998. *Public Policy State of the Dicipline, Models and Process, Modul Program Pasca Sarjana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Hill, Michael. 1997. *The Policy Process: A Reader*. New York: Harvester-Wheatsheaf.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Buni Aksara.
- Mazmanian, Daniel H and Paul A. Sabatier. 1998. *Implementation and Public Policy*. Harper Collins. New york.
- Miles, Matthew B dan Huberman A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, J Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Aksara.
- Jones, O. Charles. 2003. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Remaja Grafindo Persada.
- Santoso, Amir. 1988. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 3, Gramedia.
- Sukarno, 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Citra Umbara
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarko, 2000. *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Surabaya: Patyrus.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Abdul Solichin. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

....., 2001. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994 Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.

Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pressindo.

Dokumen :

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

